



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SEM LAPIK
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 192684

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.240.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/160 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 944 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 795 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 57.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 152.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 281.353.943**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.730.353.943**



III. HUTANG

Rp. 152.632.648

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.577.721.295

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.